



PENEMBAKAN KKB TERHADAP ROMBONGAN KOMNAS HAM DI PAPUA

Lisbet

Analis Legislatif Ahli Madya
lisbet.sihombing@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 27 April 2025, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah menembak Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, beserta rombongan. Penembakan terjadi sekitar pukul 07.10 WIT pada saat Frits dan rombongan hendak turun ke Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Tidak ada korban akibat penembakan tersebut.

Frits dan rombongan berada di wilayah tersebut karena ikut serta dalam pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun. Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang sejak tanggal 18 Desember 2024 saat melakukan operasi penangkapan terhadap KKB di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Ada dugaan bahwa Iptu Tomi Marbun hanyut pada saat hendak menyeberangi Sungai Rawara yang memiliki arus deras. Frits dan tim pencarian yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Jhony Isir, bersama dengan ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob serta Polres Teluk Bintuni telah berada di Kabupaten Teluk Bintani sejak Senin, 21 April 2025. Tim Pencari hendak melanjutkan perjalanan menuju Distrik Moskona serta Mayerga.

Pada tanggal 28 April 2025 juru bicara Tentara Pembelaan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, dalam siaran persnya mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap aparat militer Indonesia serta Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey. Menurut Sebby, penembakan ini merupakan peringatan agar seluruh warga sipil yang terlibat dengan militer Indonesia di Sungai Rawara harus segera keluar dari wilayah operasi TPNPB.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai bahwa penembakan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum. Oleh karena itu, TB Hasanuddin mengecam keras aksi penembakan tersebut. TB Hasanuddin menilai bahwa penembakan oleh KKB ini telah melewati batas dan membahayakan upaya penegak hukum serta pelindungan atas HAM di Papua karena pada saat penembakan, rombongan Komnas HAM Perwakilan Papua sedang menjalan tugas negara.

Selain TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, juga mengutuk penembakan KKB tersebut. Dave menilai bahwa penembakan ini merupakan tindakan kriminal. Menurut Dave, OPM selama ini tidak memiliki rasa kemanusiaan dan tidak mendorong adanya perdamaian. OPM hanya mengedepankan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat Papua. Meskipun demikian, Dave tetap mendorong agar Pemerintah tetap melakukan pendekatan dialog yang baik.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Amelia Anggraini, pun menekankan pentingnya langkah tegas dari Pemerintah agar tidak tunduk terhadap aksi teror. Aksi teror dan serangan tersebut telah

2025

Minggu ke-1 Mei
(28 April s.d. 4 Mei 2025)

Isu Sepekan

Bidang Polhukam, Komisi I

berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat Papua hidup ketakutan atas aksi teror dan serangan tersebut.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa penanganan persoalan di Papua tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab TNI, melainkan memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, TNI telah menandatangani *Memorandum of Understanding* dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan KKB di Papua.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memantau langkah hukum TNI terhadap penembakan yang dilakukan oleh KKB dan meningkatkan pengamanan di Papua. Selain itu, Komisi I DPR RI mendukung upaya TNI untuk mengadakan pendekatan yang komprehensif dengan kementerian-kementerian lainnya agar insiden penembakan ini tidak akan terulang kembali. Pendekatan ini sangat penting dilakukan, baik dari sisi keamanan, sosial, maupun politik dan ekonomi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membangun daerah-daerah terpencil di Papua sehingga kesulitan masyarakat dapat diatasi. Di samping itu, Komisi I DPR RI dapat mengimbau TNI untuk mengingatkan pemerintah daerah setempat agar melibatkan masyarakat Papua dalam membangun daerahnya pada seluruh aspek baik sosial, politik, dan ekonomi.

Sumber

dpr.go.id, 28 April 2025;
Media Indonesia, 28 April 2025;
merdeka.com, 30 April 2025;
metrotvnews.com, 29 April 2025;
rmol.id, 30 April 2025;
tempo.co, 29 April 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making